

**Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme
Bangsa Indonesia**

¹Ahmad Baidawi, ² Novianti

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: ahmad.baidawi@unja.ac.id

Abstrak

Pada sistem demokrasi praktek politik identitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal itu dikarenakan pada sistem demokrasi memberikan kebebasan pada setiap individu dalam mengekspresikan politiknya termasuk politik identitas baik yang bersumber identitas aliran keagamaan maupun etnisitas. Untuk memahami praktek etnisitas dalam politik identitas ditengah keberagaman bangsa indonesia maka matakuliah politik identitas dan multikulturalisme ini diajarkan pada semester 4 di prodi ilmu politik yang salah satu materinya membahas etnisitas dalam politik identitas. Untuk metode pembelajaran pada matakuliah ini menggunakan metode *Project Based Learning (PjBL) Case Method* (studi kasus) dengan melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian lapangan sebagai materi pemicu utamanya. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami praktek etnisitas dalam politik identitas para mahasiswa akan dibekali dengan pendekatan-pendekatan teori dan konsep tentang politik identitas dan multikulturalisme. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara runtut penelitian ini akan memberikan proyeksi terhadap perumus, pembuat dan pelaksana kebijakan dalam mengelola politik identitas dan multikulturalisme di indonesia. Lebih lanjut penelitian ini akan menemukan model pembelajaran baru untuk matakuliah ini.

Kata-kata Kunci: Etnisitas, Politik Identitas, Multikulturalisme, dan Bangsa

Pendahuluan

Pemahaman terhadap bagaimana praktek etnisitas dalam politik identitas ditengah keberagaman atau multikulturalisme bangsa indonesia melalui metode *case study (studi kasus)*. Pembelajaran dengan metode *case based learning* digunakan untuk melakukan sebuah analisis terhadap praktek etnisitas dalam politik identitas. Dengan menggunakan *Case based learning* sebagai salah satu metode pembelajaran *student center learning* berbasis kasus yang dirancang untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan suatu kasus.

Case based learning digunakan, karena model ini menuntut mahasiswa agar mampu untuk menguji dan mendefinisikan problem, mengeksplorasi apa yang telah diketahui oleh mahasiswa, menentukan apa yang akan dipelajari oleh mahasiswa, evaluasi cara mahasiswa dalam menyelesaikan masalah, melaporkan penemuan mereka dalam sebuah presentasi kelas. Meningkatkan kemampuan untuk: Bekerja

dalam team, Pengelolaan terhadap proyek bersama dengan waktu yang cukup panjang (selama 1 Semester) dan menetapkan pemimpin yang memegang kendali, komunikasi dan tulisan, evaluasi proses kelompok dan pengakuan terhadap individu, Bekerja secara merdeka.

PjBL memberikan ruang kompetisi kepada mahasiswa untuk melakukan presentasi dengan model kompetisi, jika tidak terjadi kompetisi maka mahasiswa ditunjuk secara langsung untuk menyampaikan hasil diskusi. Dengan metode seperti ini mahasiswa terpacu untuk memahami dan siap menyampaikan ide secara spontan. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan: a). Analisis dan berpikir kritis, b). Menjelaskan konseptual, c). *Self-directed learning*, d). Mengaplikasikan materi kuliah ke dalam dunia nyata, e). Penelitian dan Pencarian informasi, f). Penyelesaian masalah lintas disiplin ilmu.

Berbicara tentang politik identitas ada banyak definisi, salah satunya menurut Abdilah (2002) politik identitas merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan atau bahasa. Sedangkan menurut Darity (2005) mendefinisikan bahwa etnis adalah kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain dalam suatu masyarakat dilihat dari aspek budaya. Dengan kata lain, etnik adalah kelompok yang memiliki ciri-ciri budaya yang membedakannya dari kelompok yang lain. Ciri khas budaya yang membedakannya dari kelompok etnis yang lain terlihat dalam aspek kekhasan sejarah, nenek moyang, bahasa dan simbol-simbol yang lain seperti pakaian, agama, dan tradisi.

Identitas bukan hanya persoalan belonging semata, tetapi saat ini identitas bertransformasi sebagai alat politik dalam menarik simpati publik. Semakin lama, identitas menjadi alat komoditi bagi kandidat yang maju dalam pemilihan khususnya dalam area lokal. Kontestasi demokrasi yang sifatnya lokal membuat banyaknya kandidat yang mengusung tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan kandidat yang berasal dari kelompok tertentu menggunakan sentimen etnis untuk mendapat dukungan dari pemilih.

Pada kontestasi demokrasi baik di tingkat nasional maupun lokal, peran politik identitas etnis memiliki peran andil sebagai basis mencapai kekuasaan. Politik identitas etnis dalam istilah lain dipolitisasi untuk kepentingan politik, tujuannya adalah supaya setiap individu dalam menentukan pilihan di dasarkan pada pengidentifikasian kesamaan etnis, dalam kata lain program-program yang dikampanyekan oleh kontestan tidak menjadi bahan referensi utama pemilih. Pemandangan seperti ini dalam kontestasi demokrasi sudah menjadi hal yang lumrah. Peran politik identitas etnis dalam merebut kekuasaan politik pada prakteknya dinilai berhasil, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran etnisitas sebagai jargon dalam mempengaruhi pemilih menjadi bagian terpenting dalam kontestasi politik. Eksistensi etnis oleh sebagian politisi dimanfaatkan demi mencapai kekuasaan. Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi dengan masyarakatnya cenderung menekankan terbentuknya suatu persepsi yang sama. Realitas kontribusi etnis dalam politik, disadari atau tidak sudah membudaya dalam setiap ajang kontestasi demokrasi. Beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak dari peran politik identitas yang diterapkan dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan dalam kelompok masyarakat.

Politik identitas etnis atau etnisitas sudah menjadi bahan kajian, baik di kalangan akademisi maupun non akademisi. Perhatian terhadap peran politik identitas etnis, menurut peneliti merasa sangat perlu karena eksistensinya dalam kontestasi demokrasi memiliki implikasi yang luas. Secara struktural, etnis merupakan kesatuan sistem dimana di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki kedekatan emosional oleh garis keturunan yang sama. Realitasnya adalah kontestan yang menjadi perwakilan dari salah satu etnis yang besar akan mendominasi perolehan suara terbanyak. Hal tersebut tidak menyalahi aturan karena prosesnya berlandaskan Undang-Undang atau mengikuti asas demokrasi yakni pemilihan umum (pilkada). Kontestan yang memperoleh suara terbanyak akan menduduki jabatan sebagai pemimpin yang sah.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang praktek etnisitas dalam politik identitas ditengah keberagaman atau multikulturalisme bangsa Indonesia dan pengaruh dari etnisitas dalam sistem

demokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian pembelajaran ini menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (*mixed approach*). Dimensi kualitatif lebih difokuskan pada proses perkuliahan dan dimensi kuantitatif lebih ditujukan kepada kajian dampak secara klasikal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka riset ini menggunakan metode pemecahan kasus (*case method*), dengan pendekatan studi multi kasus (*multiple case study*), pendekatan ini berusaha untuk terlibat dan melaporkan kompleksitas kegiatan sosial untuk mewakili makna aktor sosial individu membawa ke pengaturan tersebut dan memproduksi di dalamnya. Studi kasus mengasumsikan bahwa '*social reality*' diciptakan melalui interaksi sosial, meskipun terletak dalam konteks tertentu dan sejarah, dan mengidentifikasi dan menjelaskan sebelum menganalisis dan berteori. Ini mengasumsikan bahwa hal- hal mungkin tidak sebagaimana yang tampak dan hak mendalam penyelidikan lebih cakupan: pemahaman 'kasus' daripada generalisasi untuk populasi pada umumnya (Meleong: 2011).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari buku, jurnal, dokumen, dan literatur lainnya yang telah dibaca dan dianalisis, maka dapat diketahui bahwa Politik Identitas merupakan salah satu isu yang hangat di negara Indonesia. Hal tersebut karena situasi perpolitikan pada negara ini telah masuk dalam tahap mulai yang mengenal dengan hal-hal yang bersifat identitas seperti memainkan isu suku, agama, etnis, budaya, hingga golongan demi memenuhi kepentingan pada politik tersebut untuk menjatuhkan lawan.

Praktek Etnisitas dalam politik identitas dewasa ini sangat sulit dipisahkan karena dalam konteks demokrasi hari ini memberi ruang kepada semua orang apapun latar belakangnya baik agama, budaya, strata sosial dan termasuk etnis untuk berekspresi di ruang publik dengan sebebasnya. Hal ini tentu jika kita kembalikan kepada dasar negara kita yaitu pancasila dimana semua bangsa Indonesia dituntut untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan itu maka keutuhan bangsa akan terus kokoh tanpa perpecahan. Namun sebaliknya jika nilai-nilai pancasila tidak mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita maka

perpecahan akan terus terjadi ditengah heterogenitas bangsa Indonesia. Semua orang ingin menunjukkan identitasnya masing-masing baik agama, suku, politik dll. Konsep hidup ditengah keberagaman bangsa Indonesia kuncinya seperti yang tertulis di dalam semboyan sila ketiga dari pancasila yaitu Bhinneka Tunggal Ika artinya meskipun kita berbeda-beda baik agama, suku, bahasa dan rasnya tetapi tujuan kita tetap satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain itu, kita juga dituntut untuk saling menghormati perbedaan, toleransi dan saling bekerjasama dalam segala hal agar kita bisa menjadi masyarakat yang rukun dan maju.

Pembahasan

1. Sejarah Politik Identitas dan Nasionalisme Di Indonesia

Salah satu yang menarik terkait politik identitas dan nasionalisme, memberikan pencerahan terkait suatu sejarah politik identitas dan nasionalisme yang berada di Indonesia. Politik identitas dan nasionalisme begitu mendapatkan ruang sangat istimewa dalam beberapa tahun. Baik dalam praktik atau studi keilmuan di bidang politik dan sosiologis. Salah satunya adalah bahwa di dalam setudi pasca kolonial, pada dasarnya politik identitas dan sosiologis sudah ada atau di geluti sejak lama.

Kontribusi dalam hal ini yaitu telah meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budayanya. Sedangkan dalam literatur ilmu politik, politik identitas betul betul di pilah untuk membedakan dan memperlihatkan perbedaan yang sangat jelas mengenai apa itu politik identitas dan apa itu identitas politik. Identitas politik sendiri merupakan suatu kontribusi yang menentukan posisi kepentingan subjek. Sedangkan politik identitas merupakan suatu yang mengacu pada mekanisme politik, pengorganisasian identitas, baik dalam identitas politik maupun identitas sosial.

Politik identitas di pahami bahwa dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik kian terlihat dalam praktik politik mengalami kemajuan. Apalagi menjelang pesta demokrasi akbar yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Indonesia melalui agenda besar bernama PEMILU. Salah satu pakar politik yang bernama Donald L Morowitz (1998) merupakan salah satu pakar politik berasal dari Universitas Duke telah mendefinisikan politik identitas sebagai pemberian garis yang sangat tegas untuk menentukan siapa saja

yang akan di ikut sertakan dan siapa yang akan di tolak.

Suatu garis penentuan tersebut tidak bisa di rubah maka setatus baik sebagai anggota mauapunakan terlihat bersifat permanen. Agnes Heller (Abdillah, 2002:22) menggambarkan terkait politik identitas dalam hal ini yang di fokuskan pada suatu pembedaan, dimana suatu kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermainwalau akhirnya memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etis. Sehingga pada akhirnya politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, politik isu lingkungan, dan perselisihan etnis.

Nasionalisme muncul sebagai akibat dari banyaknya tanggapan terhadap industrialisasi keterceraian orang-orang dan rupa-rupa ikatan primordial kepada kkerabatan, agama dan komunitas lokal. Dalam catatan suatu sejarah Indonesia dikatakan, bahwasanya peran ideologi nasionalisme dalam politik di Indonesia sendiri di mulai oleh swkelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi budi utomo. (Zahrotunnimah, 2018. 93).

Politik identitas di Indonesia sebagian di kutip dalam bukunya politik identitas dan masa depan pluralism Indonesia, di jelaskan bahwa kasus di Indonesia politik identitas lebih terkait dengan etitas, agama ideology dan kepentingan kepentingan lokalyang di wakili pada umumnya oleh para elit politik dengan artikulasi masing-masing. Tentu sangat berbeda pemahaman sejarah nasionalisme di Indonesia dahulu, yang awal mulanya merupakan sebuah ideology, sebgai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme yang di mulai dengan penerbitan Koran medan prijaji milik pengusaha pers dan jurnalis pribumi pertama R.M. Oleh karena itu, jika di amati atau di lacak dari sejarah Indonesia politik identitas yang muncul cenderung bermuatan entitas, agama dan ideology politik. Dengan kondidsi Indonesia yang multikulturalisme, maka politik identitas dapat menjadi bahan kajian yang dapat di telaah.

2. Politik Identitas dan Etnisitas

Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta idiologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesenpatan. Akan tetapi target para pelaku lokal

telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.

Menurut suatu wilayah satuan keturunan yang disebut sebagai suku dalam sejarah perkembangan masyarakat berdasarkan keturunan yang di kenal. Pembgian wilayah kekuasaan yang di kontrol oleh belanda memberi kekuasaan antara bukti terhadap penguasaan tanah, pola hubungan sosial yang kemudian diatas namakan kepada kedua masyarakat melalui ungkapan urang ukan. Dalam etnis cenderung dijadikan sebagai legitimasi politik untuk meraih kekuasaan, kelompok yang tergabung secara struktural dimanfaatkan oleh pelaku lokal guna mencapai kekuasaan melalui proses politik yang cenderung memobilisasi jaringan melalui identitas yang diciptakan untuk memenangkan pertarungan.

Politik yang mengarah pada etnis cenderung dijadikan sebagai alat oleh pelaku diarena politik untuk mencapai kekuasaan secara struktural dimanfaatkan pelaku lokal guna mencapa kekuasaan melalui identitas etnis serta diciptakan untuk memenangkan pertarungan. Politik identitas dijadikan alat untuk legitimasi politik, ditingkat supra desa. Politik identitas di supra desa menunjukkan bhwa hubungan kepentingan politik diciptakan oleh pelaku di akuisisi oleh kekuatan modal seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya yang meahirkan pelaku politik. Dalam penguasaan aset dan sumberdaya, pembagian kekuasaan, hingga pembangunan pedesaan. Kekuasaan politik di supra desa telah menjadi mekanisme baru pencirian keuntungan bagi pelaku tertentu yang dikenal dengan istilah rent seeking (Saradi watna, Rilus A. kinseng, dan sofyan sjaf, 2018. 80-83).

3. Bahaya Politik Identitas Bagi Keutuhan Bangsa Indonesia

Saat ini ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan karena

politik identitas yang mengedepankan identitas agama menjadi semakin mengental. Bukan hanya politik identitas, bahkan, saat ini ada kelompok-kelompok yang mulai mempersoalkan ideologi bangsa. Tentunya hal ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi keutuhan bangsa. sangat ironis, kenapa pada Pemilu 2019 ini muncul pihak-pihak yang mempersoalkan ideologi negara. Padahal dulu tidak ada, bahkan hingga era Orde Baru dan beberapa pemilu langsung di era reformasi hingga pemilu 2014 tidak ada yang mempersoalkan ideologi bangsa, pemahaman mengenai bahaya dari politik identitas di tengah masyarakat. Perlu diberikan sebab isu SARA itu menyangkut emosi massa yang sebagian bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya seperti contoh pelanggaran norma sosial dan contoh pelanggaran nilai nilai Pancasila.

Selain itu, politik identitas juga bisa menimbulkan perpecahan, terlebih lagi jika berkaitan dengan identitas baik isu agama atau personal maka hal ini akan dirasa lebih sensitif. Karena politik identitas itu sejatinya kejam dan tajam karena bisa menjerumuskan mereka mereka kedalam jurang permusuhan yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Selain itu juga politik identitas menyebabkan terjadinya polarisasi isu pribumi dan non-pribumi. Memori kita masih segar mengingat kerusuhan yang menelan korban jiwa tak terperikan di hari-hari jelang runtuhnya rezim Orde Baru. Isu non-pribumi dikoaarkoarkan untuk menyerang mereka yang berkulit putih dan bermata sipit, identitas yang kini sering disebut dengan istilah ‘aseng’. Padahal, jika masyarakat peduli literasi dan diberikan informasi yang proporsional, akan menemukan jejak-jejak pribumi yang tak hanya dimiliki oleh satu suku atau ras saja. Deretan pejuang kemerdekaan nasional lahir dari identitas yang berbeda-beda. Jika tetap ngotot dengan sentimen pribumi, maka sesuai sejarah, kita akan kembali ke era homo erectus sejuta tahun silam sebagaimana hukuman bagi pelanggaran ham ringan.

Perselisihan soal agama dan klaim ketuhanan tentu tak akan pernah selesai. Bahkan, seorang yang mengaku atheis pun pada hakikatnya tak mungkin menyangkal keberadaan Zat Ilahiah. Penjelasan yang sangat rasional dari Dostoevsky, “bila dinyatakan bahwa di alam semesta ini tidak ada Tuhan, menjadi jelaslah bahwa semua perbuatan apapun akan dibenarkan.” Kalimat ini memberikan penjelasan bahwa kebenaran bisa hadir pada setiap kelompok, tapi yang berhak menentukan kebenaran

universal hanya Tuhan. Artinya, untuk dimensi ketuhanan, bisa saja sekelompok orang memegang teguh kebenarannya, sama halnya dengan kelompok lain. Semua bisa benar, juga bisa salah. Sejatinya, Jika benturan identitas primordial ini terus-menerus dibiarkan, maka demokrasi kita tak ubahnya rimba belantara, yang kuat yang akan menerkam yang lemah, dan yang banyak yang akan berkuasa.

Untuk menjaga keutuhan NKRI, akibat adanya penyalahgunaan Politik Identitas (islam), maka dibutuhkan langkah strategis dalam menata hubungan dinamis antara Islam dengan Pancasila adalah melalui upaya harmonisasi. Kiranya perlu kita pertimbangkan bersama gagasan yang telah disampaikan oleh Nasaruddin Umar (2019: 143-193), mengupas tentang merajut harmoni Islam dan NKRI. Secara khusus memberikan penjelasan tentang harmoni Islam dan Pancasila, di mana menurutnya ada tiga konsepsi yang dapat menjadi dasar untuk melakukan harmonisasi antara Pancasila dan Islam sebagai berikut:

Pertama, Menempatkan Pancasila sebagai “Melting Pot”. Dalam kondisi objektif Pancasila tampil sebagai kekuatan pemersatu (melting pot) yang menjembatani berbagai perbedaan dan kepentingan di dalamnya. Menurutnya harus adanya interaksi dinamis bukan indoktrinasi aktif dari penguasa dari realitas nilai-nilai plural tadi sekaligus melahirkan sintesa dan konfigurasi budaya keindonesiaan yang unik. Budaya keindonesiaan ini kelak menjadi wadah perekat (melting pot) yang efektif.

Kedua, Melahirkan “*Civil Society*” untuk mewujudkan nilai-nilai islami lebih dominan sebagai konsekuensi polupalsi umat Islam yang menduduki posisi mayoritas mutlak. Bukannya mengedepankan legal formal sebagai negara Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih siyasah.

Ketiga, Nasionalisme Terbuka. Keragaman bahasa, budaya hingga agama yang disatukan oleh Pancasila pada akhirnya melahirkan satu konsep yang disebut nasionalisme. Nasionalisme Indonesia dapat disebut nasionalisme terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 yang di dalamnya mengatur hak-hak asasi manusia, seperti hak berserikat, hakj beragama, hak berbudaya dan hak buday itu sendri, serta mengakui hak-hak internasional dan hak-hak kemanusiaan lainnya. Nasionalisme Indonesia dipahami sebagai sebuah konsep kesatuan yang tersusun dari berbagai unsur keberagaman. Kebneragamannya diikat oleh sebuah kesataun yang kokoh, melaluji

persamaan sejarah sebagai penghuni gugus bangsa yang pernah dijajah selama berabad-abad oleh bangsa lain, dalam hal ini Belanda dan Jepang.

Kesimpulan

Politik Identitas merupakan salah satu tindakan politik yang menggunakan strategi dengan membawa simbol-simbol identitas sebagai senjata utama dalam menghadapi lawan politik. Di Indonesia lebih dominan yang berkaitan pada suatu masalah etnisitas, agama, serta ideologi dan pelaku lokal yang berkepentingan melalui perluasan daerah. Berita yang digunakan para pelaku lokal dalam ketidakadilan dalam membangun politik bargaining. Yang di jelaskan pada setiap kesempatan. Akan tetapi target para pelaku lokal telah di anggap hanya menjadi naluri untuk memimpin suatu kelompok demi mencapai tujuan ekonomi, politik. Yang menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan faktor penentu munculnya suatu politik identitas dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah di era reformasi membuat mantapnya kedudukan pelaku lokal atas kekuasaan di arena politik lokal. Praktek politik didesentralisasi mendajikan berita etnisitas, suku, agama, dan golongan sebagai politik dalam meraih kekuasaan. Politik identitas di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: faktor struktural, dimensi politik utamanya, ketidaksinambungan politik dan etnis.

Daftar Pustaka

- Abdilah S, Ubed. (2002). Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatera.
- Darity, William A., Jr. (2005). Stratification Economics: The Role of Intergroup Inequality. *Journal of Economics and Finance*, 29(2), 144-153.
- H.A.R. Tilaar. (2007). Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Liliwiri, Alo. (2005). Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: PT LKiS
- Meleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung, Indonesia: Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Widayanti. (2009). Konsep Mengenai Identitas. Yogyakarta: Mata Bangsa.